

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SKMHT YANG SERTIFIKAT ASLI HAK ATAS TANAHNYA TIDAK DIPERLIHATKAN KEPADA NOTARIS

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/PDT.Plw/2016/PN.Smn.)

Oleh:

Dhian Rizki Irsyadita¹, Taufiq El Rahman²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang sertifikat asli hak tanahnya tidak diperlihatkan kepada Notaris dan untuk menganalisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 11/Pdt.Plw/2016/PN.Smn terkait perlindungan hukum terhadap debiturnya.

Jenis penelitian ini yaitu normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan Undang-undang, kamus dan konseptual. Meneliti data sekunder dan bersifat deskriptif yaitu penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki pada saat penelitian dilakukan.

Hasil penelitian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 11/Pdt.Plw/2016/PN.Smn menemukan bahwa keabsahan SKMHT yang sertifikat asli hak atas tanahnya tidak diperlihatkan kepada Notaris adalah tidak sah namun sudah memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, termasuk debitur.

Kata kunci: Notaris, Akta, SKMHT, Perjanjian Kredit, Kredit.

¹ Yogyakarta

² Fakultas Hukum UGM

JURIDICAL ANALYSIS OF SKMHT ASSETS WHICH THE CERTIFICATE OF ORIGINAL RIGHTS LAND ARE NOT DISCLOSED TO THE NOTARY

(Analysis of District Court Decision Number 11/PDT.Plw /2016/PN.Smn.)

By:

Dhian Rizki Irsyadita³, Taufiq El Rahman⁴

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the validity of the Power of Attorney to impose Mortgage Rights (SKMHT) whose original land title certificate is not shown to a notary and to analyze the Sleman District Court's decision Number 11/Pdt.Plw/2016/ PN.Smn regarding legal protection against debtor.

This type of research is normative, that is, research conducted by using the law, dictionary and conceptual approaches. Examining secondary data and descriptive in nature, this research will describe the facts about the problem being investigated at the time the research was carried out.

The results of this study based on Sleman District Court's decision Number 11/Pdt.Plw/2016/ PN.Smn found that the validity of the SKMHT whose original certificate of legal title was not shown to the notary was allowed and void and legal protection to the debtor had been accommodated because the judge's decision did grant the debtor's claim.

Keywords: Notary, Deed, SKMHT, Credit Agreement, Credit.

³ Yogyakarta.

⁴ Fakultas Hukum UGM